

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENANGANI PASCA BENCANA TANAH LONGSOR DI DESA GUMELAR KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS

Arif Fahan Suroso

NPP. 31.0430

*Asdaf Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Manajemen Keselamatan dan Keamanan Publik*

Email: hanzjbr99@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Marzuki, SP., M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The author on the problem of landslide disaster management in Gumelar Village, Gumelar District, Banyumas Regency carried out with Collaborative Governance to solve landslide problems in Banyumas Regency, especially in Gumelar Village. Purpose:* This study was conducted to see whether the Collaborative Governance process in dealing with landslides in Gumelar Village has been established effectively and well. **Method:** *This study uses qualitative descriptive method with inductive approach. Data collection techniques include interviews, observations and documentation. Results/Findings:* The results show that the collaboration between regional officials, the business world, and community groups can be said to be going well. This form of collaboration is like a combined apple in the context of landslide preparedness. Then there are also other forms such as joint training which is followed by personnel from each different element. However, in collaboration there are also obstacles that become obstacles in the process, such as the existence of some parties who are less aware and do not want to be involved in joint activities carried out to handle and recover after the landslide disaster. **Conclusion:** *Handling and recovery after landslide disasters can be said to be optimal and the Collaborative Governance that is established between these parties has an influence on landslide handling in Gumelar Village, Gumelar District, Banyumas Regency.*
Keywords: *collaborative governance, landslide, handling*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis pada permasalahan penanganan bencana tanah longsor di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas yang dilakukan dengan Collaborative Governance yang masih kurang dalam pelaksanaan untuk menyelesaikan permasalahan tanah longsor di Kabupaten Banyumas terkhusus di Desa Gumelar. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah proses Collaborative Governance dalam menangani tanah longsor di Desa Gumelar sudah terjalin secara efektif dan baik. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 15 informan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah, dunia usaha, dan kelompok masyarakat ini dapat dikatakan berjalan dengan baik. Bentuk kolaborasi yang dilakukan ini seperti apel gabungan dalam rangka kesiapsiagaan penanganan tanah longsor. Kemudian ada juga bentuk lainnya seperti dilakukan latihan gabungan yang diikuti oleh personil dari tiap unsur yang berbeda. Akan tetapi, dalam kolaborasi juga terdapat kendala yang menjadi hambatan dalam prosesnya, seperti adanya

beberapa pihak yang kurang sadar dan tidak ingin terlibat dalam kegiatan bersama yang dilakukan untuk menangani dan memulihkan pasca bencana tanah longsor tersebut. **Kesimpulan:** Penanganan dan pemulihan pasca bencana tanah longsor dapat dikatakan optimal dan pada Collaborative Governance yang terjalin antar pihak tersebut mempunyai pengaruh terhadap penanganan tanah longsor di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Kata Kunci: collaborative governance, Tanah Longsor, Penanganan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki letak yang rawan terhadap kejadian alam yaitu bencana alam seperti gempa bumi, pergeseran tanah / longsor, gunung berapi, tsunami, banjir, pasang surut, kekeringan, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Secara geografis Negara Indonesia berada diantara beberapa lempeng tektonis yaitu lempeng benua Australia, lempeng benua Asia, lempeng samudra Pasifik dan lempeng samudra Hindia. Selain itu ada deretan jalur vulkanis yang membentuk gunung gunung berapi yang berjejer mulai dari pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi rawan terjadi bencana baik itu gempa bumi, tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi dan bencana alam lainnya (Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil). Beberapa dampak yang ditimbulkan adalah korban jiwa, kerugian harta benda, rusaknya sarana dan pra sarana umum dan juga dampak trauma / psikis bagi para korban serta mengakibatkan terhambatnya program program pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah. Pada tahun 2022 provinsi Jawa Tengah mengalami berbagai macam bencana hal ini disebabkan karena daerah tersebut berada diatas lempeng vulkanik yang membuat banyaknya gunung berapi aktif di provinsi ini. Selain itu pergerakan tanah yang tidak stabil saat musim hujan yang mengakibatkan tanah longsor juga memperparah kondisi wilayah ini. Disaat musim kemarau banyak wilayah didaerah ini yang mengalami kekeringan terutama didaerah dataran rendah ataupun lembah. Kabupaten Banyumas yang berada di tengah-tengah pulau jawa dan juga merupakan salah satu kabupaten yang keberadaannya diujung barat Provinsi Jawa. Bencana yang paling sering terjadi di daerah ini yaitu tanah longsor yang diakibatkan karena faktor-faktor yang telah disebutkan diatas.

Tabel 1. 1 Kejadian Tanah Longsor di Kabupaten Banyumas



Sumber : Badan Pusat Statistika, 2022

Berdasarkan Table 1.2 diatas terjadi peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 76 kejadian yang sebelumnya tahun 2021 hanya 59 kejadian. Hal ini menjadi perhatian lebih terutama bagi tugas dan peran BPBD dalam menanggulangi tanah longsor tersebut.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini berlatar belakang dari pernyataan dari Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas Budi Nugroho dengan tingginya potensi bencana alam di wilayah Banyumas tahun 2022 ini. Penanganan dilaksanakan secara kolaboratif. Untuk penanganan fisik infrastruktur yang rusak misalnya maka akan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum, rumah roboh atau lainnya bisa dengan Dinas Perumahan dan Permukiman. Sementara penanganan kemanusiaan hingga logistik pasca bencana ada Dinas Sosial, PMI dan lainnya, ucap beliau. Selain itu, keberadaan Pemerintah Desa juga punya andil dalam mitigasi bencana alam ini. Apalagi saat ini sebagaimana amanat dari pemerintah pusat, desa juga diamanati untuk menganggarkan dana desa untuk mitigasi atau penanganan bencana alam dan non alam. Desapun punya andil untuk membantu masyarakat atau pemulihan infrastruktur atau lainnya yang terdampak bencana alam dan non alam. Tentunya dengan potensi bencana yang ada, tiap desa besarnya berbeda-beda, kata Mantan Camat Baturaden ini. Seperti diketahui, dari data BPBD Kabupaten Banyumas selama tahun 2022 ini sedikitnya telah terjadi bencana alam mencapai 1.100 kejadian. Bencana tanah longsor mau tidak mau kita memang anggarakan, apalagi kita memang membutuhkan hal tersebut menjadi bencana yang mendominasi dengan jumlah mencapai 900 kejadian dan selebihnya adalah banjir luapan dan lainnya. (Suara Merdeka)

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu khususnya mengenai Collaborative Governance.

Penelitian yang disusun oleh Inka Nusamuda Pratama (2021) *Konsep kolaborasi pentahelix sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam situasi Covid-19 di Kota Mataram* membahas tentang Kolaborasi konsep Pentahelix sebagai instrument percepatan pengentasan kemiskinan dalam situasi Covid-19 di Kota Mataram.

Alya Larasati Hasna (2022) *Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob Di Kota Pekalongan* bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk collaborative governance Pemerintah Pekalongan dan LSM BINTARI Foundation dalam memitigasi bencana banjir rob di Kota Pekalongan.

Penelitian yang dilakukan M. Arfani (2020) *Kolaborasi Pentahelix dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana pada Destinasi Wisata Di Desa Kalanganyar Sidoarjo* Penanggulangan Bencana daerah Sidoarjo mempunyai fungsi dan tugas dalam penanganan masalah bencana di Kabupaten Sidoarjo, dengan membuat rencana dan program untuk pencegahan bencana melalui mitigasi bencana baik pra bencana, bencana maupun pasca bencana.

Penelitian sebelumnya yang pertama disusun oleh Halim Jauhari Alimin pada tahun 2022 *Proses Collaborative Governance dalam Upaya Mencegah Abrasi Pantai di Desa Numana Kabupaten Wakatobi*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana

peran proses pelaksanaan tata kelola kolaboratif dapat berkontribusi untuk menghindari terjadinya abrasi di Desa Numana, Kabupaten Wakatobi.

Penelitian sebelumnya disusun oleh Dwi Nur Ilma Aulia pada tahun 2019 *Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi situasi banjir di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

Dalam penelitian Pradana (2018) yang membahas tentang *Efektivitas Penanggulangan Risiko Bencana Alam Melalui Pendekatan Kolaboratif di Desa Wukirsari Kabupaten Bantul*. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penanggulangan risiko bencana secara kolaboratif serta mengidentifikasi faktor efektivitas penanggulangan risiko bencana secara kolaboratif.

Berdasarkan penelitian dari Asmaddin (2022) yang membahas tentang *Kolaborasi Triple Helix dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Buton* mengatakan bahwa kebijakan penanggulangan dan tindakan bencana tanah longsor tersebut ditransformasikan kepada masyarakat yang mengalami kerentanan sehingga relasi antara perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintah dalam bidang kebencanaan sangat dibutuhkan dalam upaya mitigasi bencana utamanya bencana tanah longsor.

Model Pemantauan Persediaan Logistik Kebencanaan Dalam Menghadapi Bencana Banjir Tahunan di Kabupaten Aceh Tamiang Tesis (Nasrullah, 2018). Untuk Mendapatkan keefektifan dan keoptimalan dalam pemenuhan ketersediaan bantuan logistic bencana dalam menghadapi bencana tahunan.

Suhindarno (2021) *Strategi BPBD dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro* *Strategi BPBD untuk melakukan program mitigasi bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro* yaitu menggunakan analisis SWOT: 1. Kekuatan: Adanya hubungan kerjasama dengan instansi atau Organisasi terkait. 2. Kelemahan: Terbatasnya SDM, Kurang dalam hal bekerja sama. 3. Peluang: Meningkatnya kepedulian lingkungan di masyarakat, adanya sosialisasi tentang kebencanaan 4. Ancaman: Tuntutan Masyarakat yang semakin banyak dalam hal pelayanan, kepercayaan masyarakat menurun, curah hujan yang tidak menentu

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dalam penelitian ini peneliti membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang *Collaborative Governance* dalam berbagai macam perspektif. Peneliti memberikan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, antara lain Penelitian ini dilakukan untuk memahami peranan pemerintah yaitu BPBD dan Dinas PU, Swasta yaitu para pengusaha dan pemilik pabrik, masyarakat dalam menangani tanah longsor di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, Penelitian ini menggunakan Kerangka Teori Collaborative Governance dipadukan dengan perundang-undangan yang penanggulangan bencana, Penelitian ini membahas mengenai masalah penanganan bencana tanah longsor.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui *Collaborative Governance* Dalam Menangani Pasca Bencana Tanah Longsor Di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Untuk mengetahui faktor yang penghambat *Collaborative Governance* Dalam Menangani Pasca Bencana Tanah Longsor Di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Untuk mengetahui

upaya yang dilakukan *Collaborative Governance* Dalam Menangani Pasca Bencana Tanah Longsor Di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas.

II. METODE

Penulis menggunakan Teori dari Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2008: 566) yaitu: Dialog Antar Muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen pada Proses, Pemahaman Bersama dan Dampak Sementara. Simangunsong (2017:190) dalam bukunya metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian partisipatif, dimana desain penelitian bersifat fleksibel dan dapat diubah menyesuaikan dengan rencana yang dibuat oleh fenomena yang ada di lokasi penelitian yang sebenarnya. Penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri yang akan dilakukan dengan memakai metode deskriptif. Simangunsong (2017:192) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna. Oleh karena itu, harus diakui bahwa makna yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan ungkapan pertanyaan yang disusun menjadi “topik penelitian yang subjektif dan multipel”. Instrumen penelitian merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan peneliti untuk membantu dalam proses pengumpulan data agar proses tersebut bisa dipermudah. Menurut Creswell (2016:161) mengemukakan bahwa “*Research as key instruments. Qualitative researcher collect their own data through documentation, observation, or interview with the participant.*” Maksudnya bahwa peneliti adalah kunci dari instrument penelitian. Penelitian kualitatif mengumpulkan data masing berupa dokumen, observasi, atau wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis meneliti dan mendeskripsikan *Collaborative Governace* Dalam Menangani Pasca Bencana Tanah Longsor Di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas menggunakan pendapat Ansell and Gash (2008: 566) yaitu: Dialog Antar Muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen pada Proses, Pemahaman Bersama dan Dampak Sementara. Pembahasan dapat dilihat pada sub bab berikut:

3.1 Proses kolaborasi

Pemerintah memiliki peran yang besar dalam hal menangani bencana tanah longsor di kabupaten banyumas namun hal tersebut tidak serta merta menjadikan penanganan tersebut menjadi efisien karena keterbatasan beberapa aspek sehingga mendasari terjadinya collaborative governanace dalam menangani tanah longsor di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas.

3.1.1 Dialog Antar Muka dalam Proses Kolaborasi

Dalam proses kolaborasi yang ingin dijalankan, perangkat daerah yang berkaitan dengan bencana tanah longsor ini seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan masyarakat juga diharapkan dapat membentuk kolaborasi dengan beberapa pihak yang dapat

saling membantu tugas dan pokok masing-masing perangkat daerah dalam menangani tanah longsor.

3.1.2 Membangun Kepercayaan dalam Proses Kolaborasi

Penting untuk membangun sebuah kepercayaan dalam sebuah kolaborasi dikarenakan dengan tingginya rasa kepercayaan masing-masing pihak maka akan semakin tinggi tingkat keberhasilan kolaborasi yang dijalankan dalam penanganan bencana tanah longsor. Sama halnya seperti suatu hubungan pada umumnya yang apabila tidak terbangun kepercayaan yang baik antar pihak yang berhubungan itu, maka hubungan itu pun hanya dapat berjalan dalam waktu singkat saja.

3.1.3 Komitmen Bersama pada Proses Kolaborasi

Dalam kolaborasi penentuan tujuan atau arah jalannya kolaborasi yang akan dilakukan karena akan mempengaruhi jalannya kolaborasi yang dijalankan nantinya, sebelum terbentuknya sebuah kolaborasi akan dilakukannya sebuah koordinasi antar pihak terkait yang mempunyai tujuan yang sama.

3.1.4 Pemahaman Bersama Dalam Kolaborasi

Memiliki pandangan yang sama dalam melakukan kolaborasi adalah salah satu proses yang dimana merupakan langkah-langkah dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Dalam memahami proses kolaborasi yang melibatkan perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha maka terdapat beberapa faktor yang menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kolaborasi dalam menangani dan memulihkan akibat dari bencana tanah longsor di Desa Gumelar

3.1.5 Hasil Sementara dari Proses Kolaborasi

Berdasarkan proses kolaborasi yang dilaksanakan dalam penanganan bencana tanah longsor di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas masih belum terlihat secara menyeluruh hasil dari kolaborasi yang dilakukan antar pihak yang terlibat terutama dalam hal penanganan setelah terjadinya bencana tanah longsor.

3.2 Hambatan yang dialami dalam Kolaborasi Antara Perangkat Daerah, Kelompok Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penanganan Bencana Tanah Longsor Di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas

Berdasarkan hasil observasi dari peneliti mengenai kendala dalam penanganan bencana tanah longsor ini menunjukkan bahwa yang menjadi hambatan utama ialah keadaan geografis dan sarana prasarana yang dimiliki. Wilayah Kabupaten Banyumas memang berada di dataran tinggi memiliki tanah yang labil, sehingga apabila terjadi hujan deras lebih dari semalam maka akan menimbulkan pergerakan tanah yang tidak terkontrol sehingga mengakibatkan bencana tanah longsor. Terlebih lagi apabila akses yang dimiliki sulit untuk dilalui akan menghambat dalam perjalanan menuju lokasi bencana. Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki juga ada beberapa yang masih

kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang hal ini biasa disebabkan karena kurangnya anggaran yang dimiliki ataupun kurangnya perawatan yang diberikan dari para pihak.

3.3 Upaya untuk Mengatasi Faktor Penghambat yang ada dalam Kolaborasi Antara Perangkat Daerah, Kelompok Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pasca Bencana Tanah Longsor Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Di Kabupaten Banyumas

Dalam penanganan dan pemulihan dari pasca bencana tanah longsor di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas ini masih banyak ditemukan kendala-kendala dan kekurangan yang dapat menghambat dalam pelaksanaannya. Entah itu karena wilayah Banyumas yang luas dan akses yang dimiliki masih banyak yang dapat dikatakan rusak, bisa karena sarana dan prasarana yang dimiliki dari masing-masing pihak penanganan tanah longsor masih ada yang belum memadai, maupun karena faktor dari kesadaran masyarakatnya sendiri yang masih beberapa ada yang kurang peka dalam menghadapi bencana tanah longsor seperti itu.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Collaborative Governance dalam menangani tanah longsor di Desa Gumelar sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat hambatan yang cukup berpengaruh terhadap pelaksanaannya contohnya para anggota WADULNA MAS yang banyak dari mereka yang suka rela bekerja untuk membantu dalam penanganan bencana di Kabupaten Banyumas tanpa di beri gaji oleh pemerintah, selain itu sebagian dari personil mereka masih banyak yang belum berkopeten dalam bidang penanganan bencana dikarenakan belum mengikuti diklat kebencanaan, adapun dari Dinas PU personil dari mereka hanya 10 orang saja yang punya pengalaman dalam penanganan bencana yang membuat kadang mereka keteteran dalam membantu penanganan bencana hal tersebut sama seperti temuan dari Alya Larasati Hasna (2022)

IV. KESIMPULAN

Kolaborasi tersebut telah melibatkan perangkat daerah dalam hal ini ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, kemudian ada melibatkan beberapa perusahaan seperti perusahaan konstruksi dan perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Banyumas, dan ada juga melibatkan kelompok masyarakat dalam penanganan bencana tanah longsor. Kolaborasi ini telah menjalankan menjalankan beberapa tahap dari collaborative governance yaitu dialog tatap muka dalam proses kolaborasi, membangun Kepercayaan dalam proses kolaborasi dengan melakukan komunikasi secara terus-menerus, komitmen bersama pada proses kolaborasi Komitmen yang ada dalam kolaborasi antar pihak, pemahaman bersama dalam kolaborasi dengan memiliki tujuan yang sama membuat para pihak akan bersama juga dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan Hasil sementara dari proses kolaborasi Hasil dari terjalannya kolaborasi dalam penanganan tanah longsor.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Cresswel.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada

lokasi serupa berkaitan dengan penanganan pasca bencana tanah longsor di Desa Gumelar untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada Kepala BPBD dan jajarannya, Kepala Dinas PU dan jajarannya, CV. Elvira Bumi Persada, Camat Gumelar Relawan Wadulna Mas dan Kepala Desa Gumelar serta warganya yang telah membantu penulis dalam menyukkseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2007). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bevaola Kusumasari. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- BNPB, 2012. *Buku Panduan Fasilitator: Modul Penelitian Dasar Penanggulangan Bencana*. Diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional. Cetakan Pertama.
- Leo Agustino, 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nurjanah. R. Sugiharto. Dede Kuswanda. Siswanto BP. Adikoesoemo. 2013. *Manajemen Bencana*. Alfabeta.
- O'Flynn and John Wanna. 2008. *Collaborative Governance: A New Era Of Public Policy In Australia*. Australia: E Press.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodelogi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.
- Simangunsong, Fernandes. 2021. *Menata Ulang Organisasi Perangkat Daerah*. Bandung : Alfabeta
- Ansell, C & Alison G. 2007. *Collaborative Governance In Theory and Partice. Journal Of Public Administration Research and Theory*. University of California: Berkeley.
- Ansell, Chris & Gash, Alison. 2008. *Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory*. Oxford University Press
- Arfani, Mochammad. "Kolaborasi Pentahelix Dalam Upaya pengurangan Risiko Bencana Pada Destinasi Wisata Di Desa Kalanganyar Sidoarjo," *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 3(1a). 2022
- Hasna, Alyaa Larasati. "Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob Di Kota Pekalongan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* Vol 7(1). (2023)
- Pratama, Inka Nusamuda. "Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram," *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*. Vol 10. 2023.
- Nasyiruddin,dkk.2015."Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bantaeng." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Pratama, Rezki,dkk. 2018. "Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau." Buana.
- Suhindarno, Heny. 2021. "Strategi BPBD Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Di Kantor BPBD Bojonegoro)." *IAIN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Universitas Bojonegoro*.